

WADUH! BANTUAN 5 M BAGI RSUD HAULUSSY MASUK DI DINKES



Sumber gambar: <https://bobo.grid.id/>

Bantuan anggaran Rp5 M dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy ternyata masuk di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku dan tidak dikelola oleh rumah sakit milik daerah tersebut. Padahal bantuan Rp5 M itu untuk membantu kebutuhan obat-obat di RSUD dr. M. Haulussy. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD dr M. Haulussy, Novita Nikijuluw, ketika dikonfirmasi Siwalima terkait bantuan Rp5 M itu mengaku, pihak RSUD tidak mengelola anggaran tersebut.

Novita Nikijuluw mengaku, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan bantuan yang dialokasikan untuk kebutuhan operasional tidak dikelola RSUD dr. M. Haulussy. Salah satu alasan utama, yakni persoalan hutang rumah sakit kepada perusahaan farmasi yang hingga kini belum diselesaikan. “Soal 5 miliar rupiah memang betul rumah sakit tidak bisa terima langsung, karena dari dulu hutang yang banyak maka dikunci secara sistem,” ujar Novita Nikijuluw.

Menurut Novita Nikijuluw, dua dari tujuh perusahaan yang hutangnya telah diselesaikan sudah dapat menggunakan *e-katalog*¹, namun ada beberapa jenis obat yang tidak ada pada perusahaan tersebut sehingga perlu dicari di perusahaan lain. Karenanya, anggaran Rp5 M tersebut diserahkan ke Dinkes agar dapat melakukan pembelian obat melalui *e-katalog*, tetapi pengusulan kebutuhan obat tetap berasal dari rumah sakit. “Obat-obatan diatur oleh apoteker dan pelayanan. Artinya kebutuhan itu diusulkan tetapi tidak segampang itu birokrasinya karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak berasal dari RSUD dr M. Haulussy melainkan dari Dinas Kesehatan, dan peruntukan uang itu untuk kebutuhan rumah sakit,” tegas Novita Nikijuluw.

¹ Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk standar nasional indonesia, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa (Pasal 1 Angka 1, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan Dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik).

Terkait dengan penggunaan anggaran Rp5 M tersebut, Novita Nikijuluw mengakui berdasarkan hasil koordinasi ternyata telah digunakan sebesar Rp2 M untuk pengadaan obat-obatan. Selain itu terdapat beberapa obat-obatan yang telah dipesan tetapi saat ini belum tiba di Ambon, sebab prosesnya cukup lama.

“Selain obat-obatan ada juga bahan medis habis pakai, *reagen*² dan beberapa item lainnya untuk penggunaan selama tiga bulan ke depan. Kemarin obat dari Kimia Farma sudah tiba di Dinkes, RSUD hanya perlu mengajukan permintaan dan mengambil dari sana. Akan tetapi ada juga obat yang sudah dalam proses namun belum tiba,” ujar Novita Nikijuluw. Novita Nikijuluw memastikan anggaran tersisa sebesar lebih dari Rp1 M dan telah diusulkan kebutuhan obat-obatan untuk tiga bulan kedepan.

Obat Jadi Masalah

Novita Nikijuluw juga mengungkapkan, obat-obatan masih menjadi masalah di RSUD dr M. Haulussy. Hal ini diakui Plt. Direktur RSUD dr M. Haulussy saat menjawab isu kekosongan obat di rumah sakit milik pemerintah daerah itu. Novita Nikijuluw menjelaskan, sejak beberapa tahun belakangan RSUD dr M. Haulussy mengalami masalah terkait obat-obatan dikarenakan hutang yang dimiliki rumah sakit kepada pihak ketiga sejak Tahun Anggaran 2020-2023.

Namun, di Tahun Anggaran 2023 RSUD dr M. Haulussy telah melunasi hutang obat kepada tujuh perusahaan dari total 30 (tiga puluh) perusahaan farmasi dan hanya tersisa 23 (dua puluh tiga) perusahaan. “Untuk kebutuhan obat-obatan sebisa mungkin terisi, walaupun ada kurang secepatnya *follow up*,” ungkap Novita Nikijuluw. Menurutnya, jika terjadi kekurangan kekosongan obat di RSUD dr M. Haulussy biasanya terjadi karena tidak ada informasi secara berjenjang dari apoteker.

Terkadang apoteker mengatakan obat masih ada namun ketika ada pasien baru, dikatakan jumlah yang ada sudah berkurang karena tidak menggunakan *buffer stock*³. Novita Nikijuluw memastikan persoalan kekurangan obat tersebut tidak dibiarkan terjadi berlarut-larut, artinya meskipun keluarga pasien sudah terlanjur membayar obat berdasarkan resep, maka rumah sakit akan mengganti uang tersebut kepada pasien. “Yang dibilang tidak ada obat itu faktornya ada dua; yakni keterlambatan informasi dan waktu. Contoh, misalnya teriak di hari Sabtu atau Minggu dan obat yang dibutuhkan tidak ada maka terpaksa keluarga ambil resep dan nanti uangnya akan diganti oleh rumah sakit,” jelasnya.

² Reagen atau reagent adalah sebuah substansi yang ditambahkan pada sebuah campuran untuk memunculkan rantai reaksi kimia dari campuran tersebut. Sumber: <https://genecraftlabs.com/> (diakses: 24 Oktober 2024).

³ Buffer stock adalah sejumlah kelebihan persediaan yang sengaja disimpan perusahaan guna menjaga agar stok tetap aman. Sumber: <https://kledo.com/> (diakses pada 24 Oktober 2024).

Novita Nikijuluw menambahkan, pihaknya sebisa mungkin dengan keterbatasan anggaran di rumah sakit tetap mengusahakan untuk menutupi semua. Bahkan biasanya bagian keuangan telah menyiapkan uang di apotek untuk menggantikan kepada keluarga pasien yang terlanjur membeli obat diluar rumah sakit. “Untuk keterbatasan obat itu memang permasalahan di semua rumah sakit tapi saat ini sebisa mungkin ditanggulangi artinya kalau ada obat saat itu terpaksa pasien membeli betul adanya, akan tetapi uang tersebut tetap digantikan,” terangnya.

Pemprov Alokasi Rp5 M

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Sekretaris RSUD dr M. Haulussy, Fatum Pulhehe mengungkapkan, Pemprov Maluku membantu kebutuhan obat-obat RSUD dr M. Haulussy dengan mengalokasi dana sebesar Rp5 M. Fatum Pulhehe mengakui, obat-obatan di RSUD dr M. Haulussy beberapa bulan terakhir pasca Covid-19 yang mengakibatkan hutang obat membengkak, sehingga distributor enggan untuk suplai obat.

Namun, untuk mengatasi persoalan obat-obatan di RSUD dr M. Haulussy, manajemen RSUD H dr M. Haulussy meminta bantuan Pemprov Maluku sebagai pemilik rumah sakit. “Pemprov Maluku sudah menyerahkan bantuan Rp5 M untuk bantuan obat-obatan. Ini bukti bahwa Pemprov Maluku tidak lepas tangan dari RSUD dr M. Haulussy,” kata Fatum Pulhehe.

Ketersediaan obat yang diperbaiki ini, telah berdampak pada jumlah pasien dirawat di RSUD dr M. Haulussy yang mengalami peningkatan pasca terpukul akibat Covid-19 lalu. “Untuk pasien sudah mulai peningkatan. Memang sempat terpukul dan empat bulan lalu data pasien di bawah sepuluh, tapi sekarang sudah mencapai 60 (enam puluh) pasien,” katanya. Fatum Pulhehe menegaskan, pihaknya terus memperbaiki kualitas pelayanan di RSUD dr M. Haulussy termasuk ketersediaan obat bagi kebutuhan pasien. Apalagi pasca Covid-19 RSUD dr M. Haulussy terus melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna memperlancar klaim pasien. “Klaim BPJS Kesehatan juga sangat penting bagi operasional, sehingga pendampingan BPJS Kesehatan juga terus dilakukan, agar masalah di RSUD dr M. Haulussy dapat diurai satu per satu,” terangnya.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, “Waduh! Bantuan 5 M bagi RS Haulussy Masuk di Dinkes”, 22 Oktober 2024.

Catatan:

Anggaran belanja obat di rumah sakit merupakan komponen terbesar dari pengeluaran rumah sakit. Biaya yang besar tersebut tentunya harus dikelola dengan efektif dan efisien, mengingat dana untuk pembelian obat di rumah sakit tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Efisiensi penggunaan obat dapat dicapai melalui perencanaan dan pengendalian obat yang baik.

Jika pengelolaan tidak efisien akan berdampak negatif terhadap rumah sakit maupun pasien secara medis maupun ekonomi.

Pengadaan obat melalui katalog elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik. Pengaturan perencanaan dan pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik bertujuan untuk menjamin transparansi, efektifitas, dan efisiensi proses perencanaan dan pengadaan obat melalui *E-purchasing* berdasarkan Katalog Elektronik yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah dan institusi swasta. Pengadaan obat oleh institusi pemerintah dan institusi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk program Jaminan Kesehatan dilakukan melalui *E-purchasing* berdasarkan Katalog Elektronik.